JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 telah berakhir, sehingga perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

Renja Kejaksaan Tahun 2023 terdiri atas:

a. Buku I tentang Renja Kejaksaan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
b. Buku II tentang Matriks Rencana Kinerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

Renja Kejaksaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden; dan
b. menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja, bidang atau unit kerja sebagaimana Renja Kejaksaan Tahun 2023.

Pasal 4

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2023.
(2) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
(3) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
(4) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai berikut:
    a. laporan bulanan paling lambat pada tanggal terakhir dari setiap bulan;
    b. laporan triwulan pertama paling lambat pada tanggal 31 Maret;
    c. laporan triwulan kedua paling lambat pada tanggal 30 Juni;
    d. laporan triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 30 September; dan
    e. laporan triwulan keempat paling lambat pada tanggal 31 Desember.
(5) Selain disampaikan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Laporan Kinerja dan Anggaran juga dapat disampaikan secara sewaktu-waktu atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

Pasal 5

(1) Jaksa Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran triwulan dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk disampaikan kepada:
    a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
    b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(2) Dalam hal diperlukan, Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bahan pertimbangan

untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2023 menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
(2) Penyusunan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 334

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun keempat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2023 ini disusun pada tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2023 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2023 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2022, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditujukan

untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2023 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan RI tahun 2023, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2023 yaitu "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan RI, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan RI.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2023 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2023 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2023 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2023 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2023 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran prioritas nasional melalui pelaksanaan sasaran strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, sasaran program untuk tingkat Eselon I, sasaran kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun lanjutan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dari tahun 2021. Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga pencapaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:
1. mengimplementasikan kebijakan money follow program dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong K/L untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar K/L dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:
1. hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/kegiatan/ *output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan RI penerapan RSPP terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen:
    a. Bimbingan Teknis Case Management System (CMS) Perdata dan Tata Usaha Negara;
    b. Pengadaan Perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara;
    c. Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC);
    d. Pembuatan Ruang Restorative Justice;
    e. Pengembangan Implementasi Adhyaksa Mediation Centre;
    f. Pembuatan Pos Pemilu;
    g. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
    h. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
    i. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    j. Pendidikan dan Pelatihan Mafia Tanah;
    k. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pidana Pemilu;
    l. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset
    m. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Undang-Undang Sensibilitas Gender
    n. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Undang-Undang Cipta Kerja

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
   a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
   b. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam Penanganan Perkara Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
   c. Penanganan Perkara Siber;
   d. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2023 mempunyai tujuan untuk:

1. Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Renja Tahun 2023 dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program PN.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan RI yang andal, profesional, proporsional, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan RI.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan prinsip *money follow function* dan prinsip *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan tahun 2023.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat tentang Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023, yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2023, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2023, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2023 Rekomendasi Hasil Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2022, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2022, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2022.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan RI yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi

publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19), dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitaliasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi *ekonomi yang inklusif* ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah *pembangunan berkelanjutan* difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
   - pertumbuhan ekonomi;
   - tingkat pengangguran terbuka;
   - rasio gini; dan
   - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan - 11 -ndicator:
   - indeks pembangunan manusia; dan
   - tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
   - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
   - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
   - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.

2. Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
   - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
   - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi: Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui srategi:
   - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
   - Memperkuat peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
   - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
   - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
   - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
   - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
   - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
   - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
   - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi: Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023, kemudian dituangkan kedalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan berlanjut pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuh PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detil dari PN dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian tujuh PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan,

dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.

C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Apabila merujuk pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023, PN ke-7 yaitu "*Pembangunan Politik, Hukum,* Pertahanan*, dan Keamanan (Polhukhankam)*" tahun 2023 tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2023, maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2023 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing Aparatur Penegak Hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/*Major Project* (MP), yaitu:

1. Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2023 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Detil kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023

RKP Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2023 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2023 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Dikatakan demikian, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07%, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belum lagi, cenderung masih kuatnya *business as usual*, pertumbuhan potensial ekonomi nasional pasca Covid-19 diperkirakan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Oleh karena itu, penurunan produktivitas ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari apa yang dinamakan dengan "*Middle Income Trap*". Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka Panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2023 mengedepankan "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sebagaimana diuraikan dalam BAB sebelumnya, tema RKP Tahun 2023 mengedepankan "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2023. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2023 ditegaskan memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa suasana kondusif dalam pembangunan ekonomi tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparatur untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2023 disusun dengan tema "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan bahwa Institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakkan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (*tiga*) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan RI memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 yaitu "KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan RI berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

- Berintegritas : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2023 aparat Kejaksaan RI dapat menjadi andal, profesional, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan RI yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2023

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis TI.

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan RI berbasis TI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan RI untuk periode tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI;
2. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang akuntabel dan berintegritas;
3. Meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara; dan
6. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan RI tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2023. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2022, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

D. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2022

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah seluruh unit kerja Kejaksaan RI, termasuk di pusat dan daerah dalam rangka penyusunan draf rencana kerja dan anggaran Kejaksaan RI pada tahun 2023 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam pagu indikatif. Hasil dari Musrenbang ini menjadi bahan bagi Jaksa Agung RI dalam menghadiri Musrenbang Nasional/Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat berdasarkan siklus perencanaan dan pembangunan.

Pramusrenbang merupakan pendahulu sebelum dilaksanakannya Musrenbang. Pramusrenbang adalah forum musyawarah pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk menyusun draf rencana kerja anggaran satuan kerja tahun 2023 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan RI. Sama halnya dengan Musrenbang, Pramusrenbang bertujuan menyiapkan draf rencana kerja anggaran tahun 2023 sesuai ketersediaan pagu indikatif.

1. Rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
   a. Hasil penyusunan indeks biaya perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp73.990.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Indeks Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebesar Rp 59.580.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
   b. Usulan kegiatan prioritas:
      1) pengembangaan *Adhyaksa Mediation Centre* (AMC); dan
      2) pengadaan mobil pelayanan dan pendampingan hukum untuk kegiatan pelayanan dan pendampingan di tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
   c. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran pertimbangan hukum (*legal audit*) serta penegakan hukum (pembubaran PT) pada tingkat Kejaksaan Tinggi.
2. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Umum
   a. Indeks biaya perkara berdasarkan jarak dan keberadaan pemangku kepentingan eksternal dalam penanganan perkara.
   b. Usulan kegiatan proritas:
      1) penanganan perkara siber; dan
      2) bimbingan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.
3. Rekomendasi Bidang Intelijen
   a. Tidak terdapat indeks biaya perkara pada Bidang Intelijen.
   b. Usulan kegiatan prioritas:
      1) Direktorat A

         Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, Bidang Intelijen perlu memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang ada, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar dan aman, sebagai berikut:

a) Anggaran pembuatan posko pemilu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS sebagai salah satu komponen anggaran PN dalam postur anggaran masing-masing satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.

b) Postur anggaran masing-masing satuan kerja Kejaksaan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a), akan dialokasikan anggaran sebesar Rp63.652.800.000,- (enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan di tahun 2023.

c) Diperlukan anggaran pendidikan dan pelatihan terpadu tindak pidana pemilu yang akan dianggarkan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas personil pada posko Pemilu (usulan rekomendasi kepada kelompok kerja pada Bidang Tindak Pidana Umum dan Badan Pendidikan dan Pelatihan) sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).

2) Direktorat B

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bidang Intelijen perlu memetakan konflik sosial di masyarakat khususnya daerah-daerah dengan tujuan pengembangan pembangunan seperti pembangunan jalan tol, kawasan industri, pembangunan bendungan dan lain-lain, yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM berat sehingga dibutuhkan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

3) Direktorat C

Dukungan terhadap iklim investasi dan untuk mendorong pemulihan dunia usaha, perlu memetakan AGHT bidang investasi dan penanaman modal, ketenagakerjaan, agraria dan tata ruang (optimalisasi satgas mafia tanah), serta sektor perdagangan (operasi intelijen kebijakan ekspor CPO) dan lain-lain, dengan rekomendasi kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan pelacakan aset dan pelaksanaan direktif Presiden terkait kegiatan satgas mafia tanah pada tahun 2023 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

4) Direktorat D

Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, Bidang Intelijen berperan melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mengantisipasi AGHT yang berpotensi menghambat pembangunan Ibu Kota Negara, dengan rekomendasi kebutuhan anggaran kegiatan pengamanan pembangunan strategis (PPS) di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri termasuk pada lokasi Ibu Kota Negara sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan menyesuaikan indeks anggaran PPS Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

5) Direktorat E

Kinerja Bidang Intelijen membutuhkan perangkat intelijen yang mampu menyimpan, mengolah dan menyajikan data intelijen secara terkini *(realtime)* untuk disampaikan kepada pimpinan, dengan rekomendasi kebutuhan anggaran untuk perpanjangan lisensi dan pemeliharaan (*maintenance*) peralatan intelijen sekaligus peningkatan kompetensi SDM Intelijen melalui

sertifikasi keahlian pada tahun 2023 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

6) Pusat Penerangan Hukum

Pelaksanaan program penyuluhan hukum berbasis desa dengan pendekatan materi sosialisasi kearifan lokal pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri berperan dalam rangka mewujudkan kerukunan dan sikap toleran antar masyarakat, dengan rekomendasi pemenuhan kebutuhan anggaran dan inovasi kegiatan Jaksa Menyapa yang tidak hanya memanfaatkan saluran radio.

4. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Khusus

Hasil penyusunan indeks biaya perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah membagi indeks berdasarkan wilayah dan demografi serta kompleksitas pembuktian perkara, dan kerawanan dalam penyelesaian perkara, yang dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

a. wilayah I yaitu satuan kerja yang berdekatan dengan pengadilan tinggi;
b. wilayah II yaitu jarak satuan kerja dengan pengadilan tinggi yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 jam perjalanan; dan
c. wilayah III yaitu jarak satuan kerja dengan pengadilan tinggi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam sehingga memerlukan biaya penginapan/pesawat/kereta api/kapal laut.

	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
LID	Rp 31.250.000,-	Rp 31.250.000,-	Rp 44.450.000,-
DIK	Rp 108.040.000,-	Rp 108.040.000,-	Rp 121.840.000,-
TUT	Rp 117.200.000,-	Rp 134.200.000,-	Rp 542.200.000,-
Eksekusi	Rp 7.500.000,-	Rp 10.200.000,-	Rp 21.500.000,-

5. Rekomendasi Bidang Pidana Militer

Usulan kegiatan prioritas:

a. penguatan kelembagaan melalui sosialisasi, *forum group discussion*, *in house training* baik internal dan eksternal;
b. penyusunan petunjuk teknis koordinasi dan penanganan perkara koneksitas serta penyusunan administrasi penanganan perkara koneksitas;
c. pengadaan sarana prasarana Eselon III dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Bidang Pidana Militer (rumah dinas, kendaraan dinas, pakaian/seragam dinas Kejaksaan beserta atributnya) agar dikoordinasikan dengan Bidang Pembinaan;
d. pengadaan mobil tahanan Bidang Pidana Militer, agar dikoordinasikan dengan Pembinaan; dan
e. melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kolaboratif antara jaksa dan unsur penegak hukum di lingkungan TNI.

6. Rekomendasi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Usulan kegiatan prioritas:

a. kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait PN;
b. kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional;
c. kegiatan pendidikan dan pelatihan jaksa spesialis bidang;

d. kegiatan pembaharuan modul-modul pendidikan dan pelatihan/konsinyering pembaharuan modul;
e. pendidikan khusus jaksa;
f. sertifikasi asessor yang harus dimiliki untuk menjaga *quality assurance* dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
g. peningkatan sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
h. pendidikan dan pelatihan terkait kebutuhan organisasi (bidang-bidang) seperti: pendidikan dan pelatihan kelautan, jiwa korsa, pelayaran, ahli perencana, dan diklat terpadu lainnya.

7. Rekomendasi Bidang Pembinaan

Usulan kegiatan prioritas:

a. bimbingan teknis CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (dukungan TI dalam bidang hukum dan sistem peradilan);
b. pengadaan perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (dukungan TI dalam bidang hukum dan sistem peradilan);
c. pengembangan implementasi Adhyaksa *Mediation* Center (penguatan layanan keadilan)
d. pembuatan ruang *Restorative Justice* (penerapan pendekatan keadilan restoratif);
e. pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan pusat data SOC (penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT;
f. pembuatan pos pemilu (peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu); dan
g. penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara (optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset).

8. Rekomendasi Bidang Pengawasan

Usulan kegiatan prioritas:

a. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing khususnya auditor yang ada di Kejaksaan RI;
b. terdapatnya asesor dalam SPIP yang bersertifikat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang merupakan hal baru dan perlu dilaksanakan segera di tahun 2022 memenuhi indeks kapabilitas penilaian APIP. Oleh karena itu membutuhkan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
c. perlunya penambahan anggaran terkait eksaminasi khusus dan pemulihan ekonomi nasional;
d. cakupan lokasi wilayah inspeksi khusus (Inspektorat Keuangan) dimana pada tahun berjalan (Tahun Anggaran 2022) masih 21 lokasi (Kejaksaan Tinggi) menjadi 34 wilayah sesuai jumlah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi; dan
e. Pemantauan khusus/peningkatan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI yang sebelumnya belum terakomodir pada tahun berjalan (Tahung Anggaran 2022).

E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2022

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2022 dan

Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI, telah ditetapkan usulan kebutuhan anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 pada Kejaksaan Agung adalah sebesar Rp14.983.093.249.439,- (empat belas triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp14.739.856.131.881,- (empat belas triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp243.237.117.558,- (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian per jenis akun belanja yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp691.173.417.057,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh tujuh rupiah) belanja barang sebesar Rp1.827.926.078.542,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan belanja modal sebesar Rp12.463.993.753.840,- (dua belas triliun empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Kemudian usulan kebutuhan riil dari seluruh satker Kejaksaan RI di daerah adalah sebesar Rp9.583.952.441.185,- (sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp8.566.187.654.743,- (delapan triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp1.017.764.786.442 (satu triliun tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian per jenis akun belanja yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp4.354.474.528.943,- (empat triliun tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) belanja barang sebesar Rp2.146.906.028.958,- (dua triliun seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 3.082.571.883.284,- (tiga triliun delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

F. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2022

Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis)/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI. Selain itu, rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinergikan capaian kinerja sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Kejaksaan RI serta tersusunnya bahan penyusunan pidato kenegaraan Presiden tahun 2022. Pelaksanaan Rakernis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 melibatkan seluruh Eselon I pada Kejaksaan Agung dengan mengikutsertakan seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

1. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan telah menyelenggarakan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 sebagai bagian dari Rapat Kerja Pola Baru vide Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Rakernis ini, Bidang Pembinaan membahas mengenai:

a. Evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2022 dan penyusunan Laporan Tahunan Semester I (Pra Laptah) Tahun 2022 yang disusun dengan menonjolkan prestasi dan kontribusi bidang/badan terkait kinerja Presiden, program pembangunan nasional serta komponen lainnya dalam penyusunan bahan Naskah Pidato Kenegaraan, Lampiran Pidato Presiden dan Laporan Kinerja Presiden RI pada tanggal 16 Agustus;
b. Pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional, Indeksasi dan tugas-tugas direktif yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI terutama Bidang Pembinaan; dan
c. Pembahasan terkait persiapan Kejaksaan RI dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara.

Dalam pelaksanaan Rakernis 2022, disimpulkan satuan kerja baik pusat maupun daerah belum sepenuhnya memahami teknik dan tata cara penyusunan laporan capaian kinerja, hambatan, strategi pencapaian target kinerja, hasil evaluasi kinerja satuan kerja semester I, strategi pencapaian target semester II dan hasil evaluasi rencana kerja tahunan Kejaksaan RI. Kedua, satuan kerja baik pusat maupun daerah belum sepenuhnya memahami mengenai Rencana Aksi Nasional, Indeksasi di lingkungan Kejaksaan RI dan tugas-tugas direktif yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI (dalam hal ini adalah Bidang Pembinaan) baik mengenai substansi maupun pelaporannya.

2. Bidang Intelijen

Bidang Intelijen telah melaksanakan perubahan siklus baru untuk pelaksanaan rapat kerja dengan menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan kinerja dan penganggaran Bidang Intelijen. Rakernis Bidang Intelijen telah ditransformasikan menjadi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dalam Rapat Kerja Pola Baru sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pramusrenbang, Musrenbang, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI;

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, realisasi penyerapan anggaran kinerja Semester I yaitu bulan Januari s.d. Juni tahun 2022 untuk satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia mencapai 32,53% atau sebesar Rp 24.910.991.262,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 76.581.145.000,- (tujuh puluh enam triliun lima ratus delapan puluh satu miliar seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51.670.793.738,- (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran akibat kebijakan *refocusing* anggaran menyebabkan beberapa program kerja belum dapat dilaksanakan.

Disamping permasalahan terkait *refocussing* anggaran, pelaksanaan kegiatan Bidang Intelijen baik di pusat maupun di daerah sulit untuk diukur karena setiap kegiatan intelijen hanya sampai pada tataran *output* dan tidak menyajikan *outcome* dari kegiatan. Hal inilah yang perlu dilakukan peningkatan kedepannya.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan Rakernis Bidang Pidum dengan mentransformasikannya menjadi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dalam Rapat Kerja Pola Baru sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pramusrenbang, Musrenbang, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI.

Bidang Tindak Pidana Umum melalui evaluasi capaian kinerja dan menyimpulkan pelaksanaan entri data Rincian *Output* (RO) pada aplikasi *Smart* dan *Emonev* ditemukan data yang tidak akurat, dikarenakan kurang ketelitian, keakuratan, ketepatan dan konsistensi data pelaporan realisasi kinerja dan anggaran perkara tindak pidana umum. Keakuratan data harus diwujudkan untuk tercapainya target rencana kerja. Oleh karena itu tingkat kepatuhan, ketelitian, keakuratan, ketepatan dan konsistensi dalam penginputan data pelaporan realisasi kinerja dan anggaran perkara tindak pidana umum harus dapat ditingkatkan. Adapun dalam 39 Rincian *Output*, dimana 5 Rincian *Output* Bidang Tindak Pidana Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.063.142.000 (dua ratus sepuluh miliar enam puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri baru terserap sebesar 28%.

Bahwa terdapat beberapa kegiatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam periode Semester I Tahun 2022 yang belum bisa dilaksanakan seperti sosialisasi dan *in house training* dikarenakan adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti hal ini, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum segera membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan hal usulan pembukaan blokir sehingga kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan segera bisa terealisasi.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan perubahan siklus baru untuk pelaksanaan rapat kerja dengan menjadikan Rakernis sebagai bagian dari perencanaan kinerja dan penganggaran dengan mentransformasikannya menjadi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dalam Rapat Kerja Pola Baru sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pramusrenbang, Musrenbang, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI;

Pembahasan mengenai Laporan Kinerja Semester I Januari – Juni 2022: Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan eksekusi Semester I (Periode Januari-Juni) Tahun 2022 sesuai dengan Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target rata-rata adalah 93,86% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh enam persen).

Persentase capaian kinerja pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 75,19% (tujuh puluh lima koma sembilan belas persen) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 90 % (sembilan puluh persen) maka persentae pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus mencapai 83,54 % (delapan puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari target yang ditetapkan atau setara Rp432.790.977.881,- (empat ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut berasal dari uang sitaan, uang pengganti, penjualan hasil lelang, denda dan hasil pengembalian uang negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dari target PNBP sebesar Rp230.757.331.249,- (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 203,95 % (dua ratus tiga koma sembilan puluh lima persen). Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 2022/Semester I (Periode Januari-Juni) Tahun 2022 bahwa seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi belum memenuhi target Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang menetapkan target belanja barang pada Triwulan ke-II/Semester I sebesar 50%, hanya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang mencapai target realisasi tersebut sebesar 51,02%, sedangkan realisasi paling tinggi sebesar 49,83% dicapai oleh wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan saat ini telah diupayakan optimalisasi realisasi penyerapan anggaran agar memenuhi target realisasi.

Pembahasan mengenai Laporan Tahunan Semester I Januari – Juni 2022. Pelaksanaan kinerja terkait SDGs, RPJMN dan RKP:

a. Rapat Kerja Teknis ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-TPB (*Sustainable Development Goals*-SDGs) yang telah ditetapkan pada Sidang Umum PBB Tahun 2015 tentang Agenda Tahun 2030, khususnya pada pilar keempat yaitu Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang diturunkan juga dalam tujuan keenam belas yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.
b. Kejaksaan telah menetapkan Renstra 2020-2024 yang pada prinsipnya mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan proyek prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.
c. Perkara-perkara yang ditangani Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Agung telah diidentifikasi sedapat mungkin untuk mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-TPB (*Sustainable Development Goals*-SDGs).

Pelaksanaan kinerja yang mendapatkan dukungan donor, PNBP, dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT): Sejauh ini belum ada kegiatan Bidang Tindak Pidana Khusus yang dilaksanakan mendapatkan dukungan donor. Rakernis merekomendasikan agar ke depan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan dukungan donor maupun pengusulan penggunaan PNBP ataupun pengusulan ABT melalui pelaksanaan tugas direktif yang diamanatkan. Pelaksanaan kinerja terkait tugas direktif, Rencana Aksi Nasional dan Indeksasi:

a. Penanganan perkara terkait penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yaitu perkara perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan sejumlah uang (suap) terkait pelaksanaan pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/*Reagent*) program percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, dugaan tindak pidana korupsi penggunaan alat *rapid test antibody* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan pemotongan jasa tenaga kesehatan untuk kegiatan *rapid test* berbayar pada KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020, dan beberapa perkara lainnya;
b. Penanganan perkara terkait Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT APR yang merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dimana perusahaan negara tersebut telah mengeluarkan dana sebesar lebih dari Rp86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar rupiah) yang seharusnya untuk membeli tanah seluas 20 ha namun ternyata tanah yang 160 diperoleh hanya seluas 1,25 ha; dugaan tindak pidana korupsi pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Luas sekitar 1.055.729m^2 dengan kerugian negara Rp 208.922.414.598,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kerugian tidak sah *(illegal gain)* sebesar Rp60.445.404.073,58 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu tujuh puluh tiga koma lima delapan rupiah).
c. Perkara terkait Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan, yaitu: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerimaan Uang Sehubungan dengan Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan 2021;
d. Perkara terkait tugas direktif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Satuan Tugas Pengamanan Investasi, perkara yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terkait hajat hidup orang banyak, dan memiliki dampak yang langsung dirasakan publik, termasuk dalam hal ini sektor penerimaan negara, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 s/d 2020 dengan estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.580.000.000.000,- (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah), perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat

udara pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011 s/d Tahun 2021, dengan kerugian keuangan negara sebesar USD609juta atau ekuivalen dengan Rp8,8triliun, perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan kerugian keuangan negara dan kerugian perekenomian negara sebesar sekitar Rp78,4 triliun dan USD7,88juta, dan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas *Export Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12,3triliun dan kerugian keuangan negara sebesar Rp6triliun, dan beberapa perkara lainnya;

e. Tugas direktif Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM Berat) yaitu perkara pelanggaran HAM berat peristiwa di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014 yang saat ini telah memasuki tahap persidangan pada Pengadilan HAM di Makassar, perkara terkait tugas direktif dari unit kerja di daerah terlampir;

f. Strategi Nasional (Stranas) TPPU. Pada periode Semester I Tahun 2022, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 10 (sepuluh) perkara TPPU, di antaranya:

   1) Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama tersangka SD;

   2) Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atas nama tersangka Johan Darsono dan tersangka Suyono;

   3) Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017 sampai dengan 2020 atas nama tersangka Hasti Sriwahyuni.

g. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP dapat diawali dengan pembangunan falsafah manajemen risiko (lingkungan pengendalian dalam arti sempit), penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, identifikasi dan penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pembangunan mekanisme informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan risiko aktual dan biaya yang ditimbulkan, monitoring, dan pengembangan lingkungan pengendalian dalam arti luas. Sehubungan dengan pelaksanaan SPIP terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI tahun 2022, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Dalam

Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022 dengan Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-031/F/Fjp/07/2022 tanggal 22 Juli 2022. Bahwa dalam rangka mendukung SPIP Terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI tahun 2022, Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengisian Kertas Kerja penilaian mandiri dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (LHPM) serta menyampaikan pemenuhan bukti dukung melalui *link* sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor: B-189/B/WJA/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

   Rakernis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2022 menghasilkan rumusan rekomendasi yang merupakan hasil pembahasan atas problematika pelaksanaan sinergitas antar Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan bidang/badan yang dikorelasikan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik termasuk sebagai hasil rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) yang diharapkan dapat segera dilaksanakan secara kolaboratif.

   Bahwa dalam Rakernis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pokja IV adalah membahas capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang diperlukan, namun pembahasan evaluasi kinerja tersebut belum dihubungkan dengan kontribusi Kejaksaan RI dalam kinerja Presiden, program pembangunan nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN), indeksasi, tugas-tugas direktif Presiden maupun kebijakan pemerintah lainnya sesuai dengan komponen dalam penyusunan bahan untuk naskah pidato kenegaraan, Lampiran Pidato Presiden dan Laporan Kinerja Presiden pada tanggal 16 Agustus.

6. Bidang Pidana Militer

   Melalui penyelenggaraan Rakernis Bidang Pidana Militer Tahun 2022 telah menghasilkan penyusunan rencana program kerja organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sebagai bahan pembahasan dalam merumuskan Program Kerja Kejaksaan yang lebih optimal dengan didukung penuh oleh anggaran. Penyusunan rencana anggaran dan program kerja tersebut dilakukan secara *bottom-up* sebagai hasil *cascading* dari RPJMN, RKP dan Program Strategis Nasional, Renstra, dan Renja Kejaksaan yang dianalisa dan dipetakan langsung oleh masing-masing bidang dan badan sebagai pemilik program, sehingga akan menghasilkan program kerja yang sejatinya merupakan cerminan dari masing-masing bidang yang telah bersesuaian dengan kebijakan pimpinan Kejaksaan RI dan diharapkan selaras dengan kebijakan pemerintah serta program pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dimandatkan pemerintah kepada Kejaksaan RI.

   Berdasarkan hasil paparan para Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi, disimpulkan bahwa belum seluruhnya staf dapat

memahami tentang bagaimana teknik dan tata cara penyusunan laporan yang menguraikan tentang capaian kinerja, hambatan, strategi pencapaian target kinerja, hasil evaluasi kinerja satuan kerja semester I, dan strategi pencapaian kinerja semester II. Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya, antara lain:

a. Terkait personel, terdapat keterbatasan jumlah personel dalam struktur organisasi Asisten Pidana Militer sebagai satuan kerja baru pada organisasi Kejaksaan Tinggi;
b. Terkait sarana dan prasarana, terdapat kendala berupa keterbatasan kendaraan operasional untuk mendukung optimalisasi kelancaran pelaksanaan tugas Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi;
c. Terkait anggaran, terjadi penyerapan anggaran yang belum optimal pada beberapa satker Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi tertentu, mengingat penyusunan mata anggaran pada lembar kerja anggaran sebelumnya difokuskan kepada anggaran penanganan perkara;
d. Masih kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, khususnya tentang teknis penanganan perkara koneksitas baik di internal Kejaksaan RI, maupun eksternal di lingkungan satuan TNI dan masyarakat pada umumnya;
e. Terdapat tumpang tindih wilayah kerja Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dihadapkan dengan adanya perbedaan wilayah hukum antara Oditurat Militer II-10 Semarang dan Oditurat Militer II-11 Yogyakarta;
f. Terkait piranti lunak, belum adanya petunjuk teknis tentang administrasi perkara, prosedur koordinasi dan prosedur penanganan perkara koneksitas yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi;
g. Terkait administrasi personel, terdapat beberapa Asisten Pidana Militer yang masih berpangkat Letnan Kolonel sehingga perlu dilakukan usulan kenaikan pangkat dalam rangka penyesuaian dengan ruang jabatan sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB;
h. Terkait pelaksanaan tugas, personel TNI yang bertugas di Kejaksaan RI belum mengenal secara mendalam tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Kejaksaan RI pada umumnya. Hal ini mengingat organisasi Asisten Pidana Bidang Militer merupakan satuan kerja baru. Demikian juga perlu dilakukan pembekalan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi jabatan Asisten Pidana Militer yang juga merupakan ruang jabatan baru dalam organisasi Kejaksaan Tinggi.

7. Bidang Pengawasan.

Rakernis Bidang Pengawasan Tahun 2022 diharapkan mampu melakukan perbaikan di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat lebih tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel guna terwujudnya paradigma Kejaksaan RI sebagai *consultant* dan *catalist* yang berperan aktif dalam optimalisasi dan mengakselerasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI baik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun kewenangan lain yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (RPJMN 2020-2024).

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan disimpulkan hal-hal sebagai berikut, seperti: autokritik Pengawasan masih mengejar kuantitas belum mengejar kualitas. Pemeriksa masih terjebak dengan rutinitas dan tidak peka terhadap issue yang aktual, seperti struktur baru atau kewenangan baru. Kemampuan dalam menganalisa kasus masih kurang. Paradigma sebagai katalisator dan konsultan masih sebatas jargon karena belum sampai pada pelaksanaan.

8. Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Melalui penyelenggaraan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 ini, disimpulkan mengenai beberapa isu penting serta hal-hal yang belum terakomodir dan atau terlaksana di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan, yaitu:
   1) permasalahan mengenai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan;
   2) kurangnya tenaga fungsional Widyaiswara;
   3) kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan PKA dan PKP; dan
   4) belum dialokasikannya untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Bela Negara untuk pejabat struktural pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, yaitu:
   1) belum optimalnya penyusunan modul (terutama modul disabilitas), dimana sebaiknya dilakukan dengan membentuk Dewan Kurikulum yang terdiri dari para pejabat struktural, fungsional dan para ahli/akedemisi universitas yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
   2) Dewan kurikulum yang dibentuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan atas Memorandum Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 169/A/SUJA/09/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Evaluasi Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); dan
   3) dalam tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Prioritas Nasional SPPA sebanyak 1 (satu) angkatan secara virtual untuk mencapai *output* kegiatan dan penyerapan anggaran.

c. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:
   1) belum optimalnya pengelolaan *Big Data* terkait alumni peserta yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
   2) belum optimalnya pengelolaan tata keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2023

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.

   Diukur dengan : jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompentensi dan atau keahlian.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

   Diukur dengan : meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah pparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

   Diukur dengan : jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

   Diukur dengan : persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

   Diukur dengan : jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

   Diukur dengan : jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dalam Renstra Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, maka Kejaksaan RI mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari APBN yang selalu

ditetapkan setiap tahunnya. Situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi Covid-19, mengharuskan Kejaksaan RI untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini Kejaksaan RI yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

Renja Kejaksaan RI Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan RI Tahun 2023 memuat arah kebijakan Kejaksaan RI tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

1. Program Kejaksaan RI

   Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan RI, Kejaksaan RI mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023, yaitu:

   a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

      Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

   b. Program Dukungan Manajemen

      Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 3 (tiga) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

   Kejaksaan RI untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor B-16/A/Cr.2/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp24.567.045.690.624,- (dua puluh empat triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023

   Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-353/MK.02/2022 dan Nomor: B-301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan RI memperoleh Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.632.179.592.000,- (sembilan triliun enam ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

Tabel 1
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	521.243.172.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.110.936.420.000
Jumlah		9.632.179.592.000

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	7.507.179.592.000
2.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	623.500.000.000
3.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.501.500.000.000
Jumlah		9.632.179.592.000

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggatan 2023 Berdasarkan Akun Belanja

No.	Akun Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	4.982.617.792.000	51,73%
2.	Belanja Barang Operasional	1.040.532.300.000	10,08%
3.	Belanja Barang Non Operasional	1.170.408.760.000	12,15%
4.	Belanja Modal	2.438.620.740.000	25,32%
Jumlah		9.632.179.592.000	

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023
untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2023

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	39.930.347.000
2.	Program Dukungan Manajemen	189.743.314.000
Jumlah		229.673.661.000

Setelah dilakukan Musrenbang Kejaksaan RI di Solo tanggal 22 Mei 2022 s.d. 25 Mei 2025, yang dihadiri oleh Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II dan Eselon III dan hasil pembahasan rapat *trilateral meeting* antara Kejaksaan RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 02 Juni 2022, dengan anggaran pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 yang terbatas dan menjaga stabilitas kebutuhan biaya penanganan perkara maka anggaran tahun 2023 yang dapat disusun per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Hasil Penyusunan Musrenbang
dan Rapat *Trilateral Meeting*

Program	Pagu Indikatif 2023 (Rp)	Pagu Indikatif 2023 Perubahan (Rp)	Selisih
1	2	3	4
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	521.243.172.000	626.702.368.000	105.459.196.000
Program Dukungan Manajemen	9.110.936.420.000	9.005.477.224.000	105.459.196.000
Jumlah	9.632.179.592.000	9.632.179.592.000	

Tabel 6
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Per Bidang

No.	Program	Pagu Indikatif 2023 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	626.702.368.000
	a. Bidang Intelijen Pusat dan Daerah	67.354.846.000
	b. Bidang Pidana Umum Pusat dan Daerah	239.647.681.000
	c. Bidang Pidana Khusus Pusat dan Daerah	257.158.582.000
	d. Bidang Datun Pusat dan Daerah	20.107.084.000
	e. Bidang Pidana Militer Pusat dan Daerah	14.492.248.000
	f. Pemeliharaan Barang Bukti di bidang Teknis	27.941.927.000
2	Program Dukungan Manajemen	9.006.194.512.000
	a. Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah	6.180.841.630.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah	2.662.496.228.000
	c. Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah	20.270.349.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	141.869.017.000

Tabel 7
Rincian Pagu Prioritas Nasional TA 2023 Per Program
Hasil Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
I.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	24.980.638.000
II.	Program Dukungan Manajemen	182.200.764.000
	Jumlah	207.181.402.000

3. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023

Bahwa Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-617/MK.02/2022 dan Nomor: B-577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan RI memperoleh Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.896.601.962.000,- (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp1.264.422.370.000,- (satu

triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika dibandingkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.632.179.592.000,- (sembilan triliun enam ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	626.702.368.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.269.899.594.000
Jumlah		10.896.601.962.000

Tabel 9
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	8.507.179.592.000
2.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	623.500.000.000
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	264.422.370.000
4.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.501.500.000.000
Jumlah		10.896.601.962.000

Kenaikan anggaran sebesar Rp1.264.422.370.000,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai lampiran I.a surat Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. Anggaran Pendidikan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
b. Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor pada 14 (empat belas) Satker Daerah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
c. Penggunaan Anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar Rp264.422.370.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Setelah dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh satker pusat (Unit Eselon I), 33 Kejaksaan Tinggi 437 Kejaksaan Negeri, dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Juli 2022 s.d. 3 Agustus 2022 anggaran per program untuk Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dapat disusun sebagai berikut :

Tabel 10
Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 Per Program
Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2023

No.	Program	Pagu Indikatif 2023 Setelah Tri Lateral *Meeting* (Rp)	Pagu Anggaran 2023 (Rp)	Selisih (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	626.702.368.000	684.057.271.000	57.354.903.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.005.477.224.000	10.212.544.691.000	1.207.067.467.000
	Jumlah	9.632.179.592.000	10.896.601.962.000	1.264.422.370.000

Tabel 11
Pagu Anggaran TA 2023 Per Bidang
Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2023

No.	Program	Pagu Indikatif 2023 (Rp)	Pagu Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	626.702.368.000	684.057.271.000
	a. Bidang Intelijen Pusat dan Daerah	67.354.846.000	67.354.846.000
	b. Bidang Pidana Umum Pusat dan Daerah	239.647.681.000	242.563.681.000
	c. Bidang Pidana Khusus Pusat dan Daerah	257.158.582.000	290.100.509.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pusat dan Daerah	20.107.084.000	20.977.084.000
	e. Bidang Pidana Militer Pusat Dan Daerah	14.492.248.000	14.492.248.000
	f. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis	27.941.927.000	48.568.903.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.006.194.512.000	10.212.544.691.000
	a. Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah	6.180.841.630.000	6.246.258.165.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah	2.662.496.228.000	3.798.847.160.000
	c. Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah	20.270.349.000	25.570.349.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	141.869.017.000	141.869.017.000

4. Pagu Alokasi Anggaran TA 2023

Berdasarkan Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2023, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan RI memperoleh Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.096.601.962.000,- (empat belas triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar rupiah) jika dibandingkan Pagu Anggaran 2023.

Kenaikan anggaran sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar rupiah) dipergunakan untuk pengadaan belanja modal sesuai lampiran I.a surat Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Tabel 12
Pagu Alokasi Anggaran Per Program TA 2023

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	684.057.271.000
2.	Program Dukungan Manajemen	13.412.544.691.000
Jumlah		14.096.601.962.000

Tabel 13
Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Pendanaan TA 2023

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	11.707.179.592.000
2.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	623.500.000.000
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	264.422.370.000
4.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.501.500.000.000
Jumlah		14.096.601.962.000

Tabel 14
Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Akun Belanja Tahun Anggaran 2023

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	2	3
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	4.982.617.792.000
2.	Belanja Barang Operasional (Layanan Perkantoran)	1.100.994.594.000
3.	Belanja Barang Non Operasional (Anggaran Rutin dan Perkara)	1.049.079.914.000
4.	Belanja Modal (Pengadaan Sarana dan Prasarana)	6.963.909.662.000
Jumlah		14.096.601.962.000

Hasil penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri pada penyusunan RKA-K/L Kejaksaan RI, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Oktober 2022 s.d. 28 Oktober 2022, anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 15
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 Per Bidang

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	684.057.271.000
	a. Bidang Intelijen di Pusat dan Daerah	66.846.821.000
	b. Bidang Pidana Umum di Pusat dan Daerah	245.014.918.000
	c. Bidang Pidana Khusus di Pusat dan Daerah	287.694.129.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha di Pusat dan Daerah	21.318.352.000
	e. Bidang Pidana Militer di Pusat dan Daerah	14.614.148.000
	f. Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara di Daerah	48.568.903.000
2.	Program Dukungan Manajemen	13.412.544.691.000
	a. Bidang Pembinaan di Pusat dan Daerah	6.275.780.648.000

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah	6.963.909.662.000
	c. Bidang Pengawasan di Pusat dan Daerah	25.712.114.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	147.142.267.000

5. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2023
   a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
      1) Bidang Intelijen Pusat dan Daerah

         Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen adalah sebesar Rp66.846.821.000,- (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang intelijen baik di pusat dan di daerah antara lain:

         a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebesar Rp21.506.691.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) antara lain:
            - Laporan hasil kegiatan intelijen di bidang ekonomi dan keuangan, kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana;
            - Laporan hasil kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan;
            - Laporan hasil kegiatan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
            - Laporan hasil kegiatan teknologi informasi dan produksi intelijen;
            - Kegiatan *monitoring center*;
            - Kegiatan monitoring sinyal;
            - Kegiatan *digital forensic*;
            - Kegiatan *tactical pasif*;
            - Kegiatan operasional kontra penginderaan dan *scanning*;
            - Kegiatan Adhyaksa *Command Center*;
            - Laporan hasil kegiatan rencana aksi;
            - Operasi intelijen kegiatan pengamanan pembangunan strategis;
            - Posko bandara/pelabuhan;
            - Penerangan hukum;
            - Penyuluhan hukum Jaksa Sahabat Masyarakat;
            - Jaksa menyapa di radio dan televisi;
            - Pelayanan informasi publik di pusat penerangan hukum; dan
            - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

         b) Kegiatan Bidang Intelijen di satker-satker daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.340.130.000,- (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut:
            - Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan;
            - Penelusuran aset terkait tindak pidana;
            - Posko bandara/pelabuhan/kantor pos;
            - Pengamanan pembangunan strategis;
            - Penerangan hukum;
            - Penyuluhan hukum berupa Jaksa Masuk Sekolah;
            - Penyuluhan hukum berupa Jaksa Menyapa di radio dan televisi;

- Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat; dan
- Kegiatan pencarian buronan.

2) Bidang Tindak Pidana Umum di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran untuk bidang Pidana Umum adalah sebesar Rp245.014.918.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum baik di pusat dan di daerah antara lain:

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sebesar Rp34.276.097.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) antara lain:
   - Penanganan perkara terhadap orang dan harta benda;
   - Penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
   - Penanganan perkara siber;
   - Penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak pidana lintas negara;
   - Penanganan perkara tindak pidana terhadap narkotika dan zat adiktif lainnya;
   - Bimbangan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;
   - Pelaksanaan FGD, Bimtek, dan sosialisasi;
   - Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan anggaran yang bersumber dari PNBP;
   - Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

b) Biaya penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker-satker daerah sebesar Rp210.738.821.000,- (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangani 108.711 perkara di daerah serta 1.038 penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di 534 satker di pusat dan di daerah.

3) Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp287.694.129.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Khusus baik di pusat dan di daerah antara lain :

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp39.189.933.000,- (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) antara lain:
   - penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan biaya perkara Rp35.987.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
   - penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan biaya perkara Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- prapenuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan biaya perkara Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- prapenuntutan dan Penuntutan perkara tindak pidana perpajakan dan pencucian uang dengan biaya perkara Rp37.665.000,- *(*tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- prapenuntutan dan Penuntutan perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai dengan biaya perkara Rp97.697.000,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti dengan biaya perkara Rp37.665.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- upaya hukum luar biasa, sita eksekusi dan eksaminasi perkara dengan dukungan anggaran untuk 1 tahun sebesar Rp6.185.459.000,- *(*enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- dukungan cadangan biaya perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, perpajakan dan pencucian uang, kepabeanan dan cukai untuk satker-satker daerah sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- prapenyidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi tindak pidana HAM berat;
- dukungan kegiatan teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- pelaksanaan FGD, Bimtek, dan sosialisasi;
- pelacakan aset dalam rangka pembayaran/pelunasan piutang uang pengganti (sita eksekusi) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBP; dan
- pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

b) Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebesar Rp248.504.196.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi sebanyak 1.102 perkara penyelidikan dan penyidikan, serta 1.203 perkara di tingkat prapenuntutan dan penuntutan, serta 1.101 untuk eksekusi perkara di 533 satker di daerah, dengan rincian biaya per perkara:
   - penyelidikan sebesar Rp29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) s.d. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
   - penyidikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d. Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
   - prapenuntutan dan penuntutan Wilayah I sebesar Rp44.190.000,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
   - prapenuntutan dan penuntutan Wilayah II sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- prapenuntutan dan penuntutan Wilayah III sebesar Rp83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp241.260.000,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- eksekusi perkara dengan terdakwa di tahan di rumah tahanan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d. Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

c) Eksekusi perkara dengan terdakwa tidak di tahan di rumah tahanan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4) Bidang Perdata dan Tata Usaha di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha adalah sebesar Rp21.318.352.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara baik di pusat dan di daerah antara lain:

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah sebesar Rp8.900.120.000,- (delapan miliar sembilan ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) antara lain:
   - pertimbangan hukum;
   - penanganan dan penyelesaian perkara perdata;
   - penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara;
   - biaya penanganan dan penyelesaian perkara perdata di luar negeri;
   - pos pelayanan hukum;
   - peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBP;
   - pemantauan dan EVALUASI PENANGANAN PERKARA OLEH Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

b) Biaya penanganan perkara perdata dan tata usaha sebesar Rp12.418.232.000,- (dua belas miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum 1.509 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 503 perkara serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 5.640 kegiatan untuk 470 satker di daerah.

5) Bidang Pidana Militer di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Militer adalah sebesar Rp14.614.148.000,- (empat belas miliar enam ratus empat belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pidana Militer baik di pusat dan di daerah antara lain:

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sebesar Rp6.643.848.000,- (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) antara lain:
   - laporan dan pengaduan perkara koneksitas;
   - penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas;
   - prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas;
   - eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas;
   - penyelesaian praperadilan perkara koneksitas; dan

- pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

b) Biaya penanganan perkara pidana militer sebesar Rp7.970.300.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan laporan dan pengaduan perkara koneksitas 120 perkara, penyelidikan perkara koneksitas 20 perkara, penyidikan perkara koneksitas 20 perkara, pra penuntututan dan penuntutan serta eksekusi/eksaminasi sebanyak 40 perkara, untuk 20 Kejaksaan Tinggi.

6) Pemeliharaan Barang Bukti

Untuk menunjang kegiatan penanganan perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara dan pidana militer pada satker-satker Kejaksaan RI di daerah diperlukan biaya pemeliharaan barang bukti untuk satker-satker di daerah sebesar Rp48.568.903.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen

1) Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp6.275.780.648.000,- (enam triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada Bidang Pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat intelijen, layanan perkantoran pada masing-masing satker Jaksa Agung Muda serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBP.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp6.963.909.662.000,- (enam triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana seluruh satker pusat dan daerah serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 15
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana TA 2023

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Pengadaan Laptop untuk Penanganan Perkara di Daerah (PNBP)	39.400.000.000
2.	Pengadaan PC dan Printer untuk Penanganan Perkara di Daerah (PNBP)	33.050.000.000

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1	2	3
3.	Pengolah Data untuk Penanganan Perkara Satker di Kejagung (PNBP)	22.885.000.000
4.	Pengembangan/Pemeliharaan/Bimtek Aplikasi e-PUSTAKA DATUN (PNBP)	764.805.000
5.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aplikasi e-Tilang (PNBP)	2.251.500.000
6.	Pengembangan Sistem Aplikasi e-Piutang (PNBP)	1.460.000.000
7.	Pengembangan Sistem Aplikasi e-PNBP (PNBP)	1.480.358.000
8.	Sarana dan Prasarana Monitoring Layanan Keuangan Kejaksaan RI dan Klinik Akuntansi (PNBP)	1.000.000.000
9.	Sistem Aplikasi e-RPL (PNBP)	1.510.000.000
10.	Pengadaan Mobil dan Motor untuk Layanan Penanganan Perkara (PNBP)	4.273.500.000
11.	Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk *Integrated Inteligence System of Attorney General of Indonesia*	1.501.500.000.000
12.	Rupiah Murni Pendamping (RMP) untuk Integrated *Inteligence System of Attorney General of Indonesia*	623.500.000.000
13.	Pengadaan Mobil Tahanan	70.122.000.000
14.	Pengadaan Peralatan Identifikasi Operasi Intelijen Dalam Rangka Operasi Intelijen Penegakan Hukum Tahap II	7.667.880.000
15.	Sistem Informasi Manajemen Resiko untuk Satker Kejaksaan RI	150.000.000.000
16.	Pengadaan PTSP *Drive thru*	5.000.000.000
17.	Pembangunan *Workshop* Pencetakan Plat Nomor	1.000.000.000
18.	Pengadaan Alat Cetak Plat Nomor	450.000.000
19.	Penyelesaian Sisa Pembayaran 3 (tiga) Proyek Telkom	243.498.740.000
20.	Pengadaan Pagar Keliling Kejaksaan Agung	15.000.000.000
21.	Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor pada 17 (Tujuh Belas) Satker Daerah	345.925.508.000
22.	Pengembangan Implementasi Adhyaksa *Mediation Centre* (Prioritas Nasional)	700.000.000
23.	Pembuatan Ruang *Restorative Justice* (Prioritas Nasional)	2.000.000.000
24.	Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC (Prioritas Nasional)	66.000.000.000
25.	Senjata Api Perlindungan Jaksa	11.206.000.000
26.	Amunisi Senjata Api Perlindungan Jaksa	1.062.275.000
27.	Pembuatan Pos Pemilu (Prioritas Nasional)	63.652.800.000

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1	2	3
28.	Pengadaan Perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (Prioritas Nasional)	20.539.200.000
29.	Pengadaan *Smart Augmented Multimedia Education System and Equipment* pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Anggaran Pendidikan)	206.173.870.000
30.	Pengadaan *Digital Data Recovery and Forensic Education Equipment* pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Anggaran Pendidikan)	250.000.000.000
31.	Sarana dan Prasarana Rutin pada Biro Perlengkapan	4.800.000.000
32.	Pengadaan *Assesment Center*	3.963.137.000
33.	Pengolah Data di Kejaksaan Negeri	187.500.000
34.	Pengolah Data di Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri	64.000.000
35.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran di Badan Pendidikan dan Pelatihan	377.250.000
36.	Renovasi Pagar Gedung Kantor di Kejaksaan Negeri	200.000.000
37.	Pengadaan perangkat Simkari dan CMS untuk Satker Baru	1.244.339.000
38.	Sistem Analisa Kebutuhan Kejaksaan RI	200.000.000.000
39.	Sarana Pendukung Mal Pelayanan Publik Kejaksaan RI	100.000.000.000
40.	*Smart System* Layanan Hukum Kejaksaan RI	200.000.000.000
41.	Kegiatan Standardisasi *Website* Kejaksaan RI	100.000.000.000
42.	Pengadaan dan Revitalisasi Ruang Aula, Ruang Rapat dan *Command Center* Dalam Rangka Pemantauan Pimpinan Kejaksaan RI	200.000.000.000
43.	Modernisasi Perangkat Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan RI	150.000.000.000
44.	Sistem Monitoring Data Tahanan dan Rumah Tahanan Kejaksaan RI	200.000.000.000
45.	*Smart Parking and Visitor* Kompleks Kejaksaan Agung	256.000.000.000
46.	Sistem Informasi Penataan *Smart Event* Gedung Utama Kejaksaan Agung dan 6 (enam) Kejaksaan Tinggi	200.000.000.000
47.	Pengadaan Perangkat Sistem *Massive Profiling* Berbasis Intelijen Prediktif pada Kejaksaan Agung	176.000.000.000
48.	Pengadaan Peralatan Intelijen Taktis (Sistem Profiler) Kejaksaan Republik Indonesia (Tahap II)	164.000.000.000
49.	Pengadaan *Multichannel Solid Medium Surveillance Car* (Tahap II)	100.000.000.000

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1	2	3
50.	Pengadaan Alat Intelijen *Detection Kit* Pengawasan Tahanan Rumah Oleh Bidang Intelijen KT Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	176.000.000.000
51.	Pengadaan Alat Intelijen Monitoring Pengawasan Tahanan di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	161.000.000.000
52.	Pengadaan Alat Intelijen Akses Jaringan dan Infrastruktur Sistem Pengawasan Tahanan Terpusat Wilayah Sulawesi	107.000.000.000
53.	Peralatan Identifikasi Barang Bukti sebagai Alat Pembuktian di Persidangan Kejaksaan RI	220.000.000.000
54.	Pengadaan Sistem Informasi Adhyaksa *Comand Center* (SIACC) Tahap III	66.000.000.000
55.	Pengadaan Alat Kontra Intelijen untuk Pengamanan *Very Very Important Person* Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	176.000.000.000
56.	Perangkat *Voice to Text* untuk Digitalisasi Berkas dan Arsip	154.000.000.000
57.	Perangkat *Strategic Advance Portal System* untuk Penguatan Tugas Fungsi Kejaksaan di Daerah	154.000.000.000
Jumlah		6.963.909.662.000

3) Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk bidang Pengawasan adalah sebesar Rp25.712.114.000,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta seratus empat belas ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengawasan di pusat dan di daerah yaitu:

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebesar Rp14.548.546.000,- (empat belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) antara lain:
   - kegiatan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi;
   - laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus;
   - peningkatan akuntabilitas keuangan; dan
   - inspeksi umum, pemantauan, inspeksi pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, *video conference* jaksa agung muda pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *whistleblowing system*, pelaksanaan zona integritas, Tim saber pungli dan Satgas 53 serta layanan pemantauan dan evaluasi.

b) Kegiatan tugas dan fungsi peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah sebesar Rp11.163.568.000,- (sebelas miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) antara lain:

- laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi;
- laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus;
- pelaksanaan inspeksi umum dan pemantauan.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran rutin untuk diklat-diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI adalah sebesar Rp147.142.267.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk anggaran pendidikan dan pelatihan antara lain:

- Belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti).
- Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
- Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU;
- Pendidikan dan Pelatihan Mafia Tanah;
- Pendidikan dan Pelatihan Pidana Pemilu;
- Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
- Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sensibilitas Gender;
- Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Cipta Kerja;
- Pendidikan dan Pelatihan *Management of Training* (MOT);
- Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
- Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
- pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional lainnya.

6. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2023

Sesuai lampiran 1.b Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-617/MK.02/2022 dan Nomor: B-577/M.PPN/D.8/PP. 04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, untuk kegiatan Program Prioritas Nasional Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 masih sesuai kesepakatan hasil rapat *Trilateral Meeting* sebelumnya pada pembahasan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp207.181.402.000,- (dua ratus tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Pagu Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2023 per Program

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	24.980.638.000
2.	Program Dukungan Manajemen	182.200.764.000
	Jumlah	207.181.402.000

Tabel 17
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/Volume	Pagu (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	155.850 orang	16.763.400.000
2.	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	300 orang	2.000.000.000
3.	Penanganan Perkara Siber	225 perkara	4.547.238.000
4.	Sosialisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkepastian hukum	1700 orang	1.670.000.000
5.	Bimbingan Teknis CMS Perdata dan Tata Usaha Negara	566 orang	6.901.428.000
6.	Pengadaan Perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara	1 unit	20.549.200.000
7.	Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC	1 unit	66.000.000.000
8.	Pengembangan Implementasi Adhyaksa *Mediation Center*	1 unit	700.000.000
9.	Pembuatan Ruang *Restorative Justice*	50 unit	2.000.000.000
10.	Pembuatan Pos Pemilu	534 unit	63.652.800.000
11.	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38 laporan	8.800.000.000
12.	Diklat Terpadu *System* Peradilan Pidana Anak	120 orang	1.847.416.000
13.	Diklat Teknis *Restorative Justice*	120 orang	1.678.560.000
14.	Diklat Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	120 orang	1.678.560.000
15.	Diklat Mafia Tanah	120 orang	1.678.560.000
16.	Diklat Pidana Pemilu	120 orang	1.678.560.000
17.	Diklat Terpadu Pemulihan Aset	120 orang	1.678.560.000
18.	Diklat Terpadu Sensibilitas Gender	120 orang	1.678.560.000
19.	Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Cipta Kerja	120 orang	1.678.560.000
	Jumlah		207.181.402.000

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Renja Kejaksaan Tahun 2023 ini, diharapkan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, Inspektur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 untuk masing-masing bidang/unit kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing bidang/unit kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan RI semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2023 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan RI baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: KEJAKSAAN AGUNG

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan RI berbasis berbasis teknologi informasi.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat	-	-	7.115.776.251.000,-	Jaksa Agung Muda Pembinaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.	Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan.				
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, dan Kerja Sama Hukum.		• Jumlah layanan penelaahan, perancangan perundang-undangan dan pertimbangan hukum. • Jumlah layanan kerja sama hukum dan hubungan luar negeri. • Jumlah layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum. • Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri. • Jumlah layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri.	Koordinasi penanganan pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.	1 kegiatan	74.000.000,-	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
				Koordinasi memberikan pendampingan penanganan ekstradisi	1 kegiatan	31.200.000	
				Kerja sama hukum antara Kejaksaan RI dengan kementerian/ lembaga di luar negeri.	1 kesepakatan	274.020.000	
				Kerja sama hukum antara Kejaksaan RI dengan kementerian/ lembaga di Indonesia	1 kesepakatan	195.250.000	
				Penyusunan dan pembahasan kerja sama hukum antar instansi pemerintah	1 kesepakatan	218.629.000	
				Penyelenggaraan sosialisasi Perja Ekstradisi	1 orang	185.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelenggaraan seminar atas implementasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan Kejaksaan asing	1 orang	193.900.000,-	
				Keikutsertaan dalam konferensi internasional	1 kegiatan	80.000.000,-	
				Analisa dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.	1 layanan	693.535.000,-	
				Penelaahan dan pemberian pertim-bangan hukum.	1 layanan	112.950.000,-	
				Pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	1 layanan	493.895.000,-	
				Pemberian pertim-bangan, pendam-pingan dan bantuan hukum dalam negeri.	1 layanan	68.940.000,-	
				Pembuatan perjanjian internasional.	1 layanan	68.940.000,-	
				Layanan perpustakaan	1 layanan	224.095.000,-	
				Layanan dokumentasi hukum	1 layanan	113.905.000	
				Layanan pendidikan dan pelatihan.	6 orang	30.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI.		• Jumlah layanan umum kepegawaian. • Jumlah layanan pengembangan kepegawaian. • Jumlah layanan kepangkatan dan mutasi kepegawaian. • Jumlah layanan pemberhentian dan pensiun.	Koordinasi antar satuan kerja dan antar instansi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai	1 kegiatan	90.000.000	Kepala Biro Kepegawaian
				Koordinasi dalam pelaksanaan rekonsi-liasi data pegawai di lingkungan Kejaksaan RI.	1 kegiatan	438.280.000,-	
				Kerja sama antar lembaga dan antar instansi dalam pelaksanaan pendi-dikan dan pelatihan pegawai.	1 kesepakatan	7.171.580.000,-	
				Sosialisasi peraturan kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.	1 orang	164.550.000,-	
				Layanan manajemen SDM.	25270 Orang	42.980.198.000,-	
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI.		• Jumlah layanan perbendaharaan. • Jumlah layanan pendapatan dan piutang negara. • Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Layanan perkantoran.	1 layanan	632.642.130.000,-	Kepala Biro Keuangan
				Layanan perencanaan dan penganggaran.	1 dokumen	7.944.785.000,-	
				Layanan pemantauan dan evaluasi.	1 dokumen	5.333.788.000,-	
				Layanan manajemen keuangan.	1 dokumen	567.965.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah layanan akuntansi dan pelaporan keuangan. • Jumlah layanan umum keuangan. • Layanan perkantoran.	Pengelolaan penerima-an negara bukan pajak Kejaksaan RI.	1 laporan	2.839.892.000,-	
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.		Meningkatnya kegiatan perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	Layanan reformasi birokrasi.	1 rekomendasi kebijakan	2.514.600.000,-	Kepala Biro Perencanaan
				Layanan pengelolaan data.	1 rekomendasi kebijakan	1.563.570.000,-	
				Layanan organisasi dan tata kelola internal.	1 layanan	2.794.260.000,-	
				Layanan perencanaan dan penganggaran.	1 dokumen	17.657.277.000,-	
				Layanan pemantauan dan evaluasi.	1 dokumen	2.825.850.000,-	
1084	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata-usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI.		• Jumlah layanan kegiatan analisis kebutuhan. • Jumlah layanan pengadaan. • Jumlah layanan pengelolaan barang milik negara. • Jumlah layanan perkantoran.	Sosialisasi/bimbingan teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).	541 orang	297.600.000,-	Kepala Biro Perlengkapan
				Sosialisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ).	500 orang	151.900.000,-	
				Layanan umum.	1 layanan	4.603.640.000,-	
				Layanan perkantoran.	1 layanan	63.685.963.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1085	Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, Kesehatan, dan Pembinaan Rohani, serta Kerumah-tanggaan.		• Jumlah layanan tata usaha umum dan pimpinan. • Jumlah layanan protokol dan pengamanan pimpinan. • Jumlah layanan keamanan dalam. • Jumlah layanan kesehatan dan pembinaan rohani. • Jumlah layanan rumah tangga. • Jumlah layanan perkantoran.	Layanan umum.	1 layanan	14.993.573.000,-	Kepala Biro Umum
				Layanan perkantoran.	1 layanan	112.352.221.000,-	
1088	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.		• Jumlah layanan pengelolaan data dan statistik kriminal. • Jumlah layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi. • Persentase satker yang menggunakan *Case Management System* (CMS) dalam rangka implementasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat.	1 unit	64.776.135.000	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
				Layanan umum.	1 layanan	2.171.841.000,-	
				Layanan perkantoran.	1 layanan	6.519.812.000,-	
				Layanan sarana internal.	1 unit	1.249.889.000,-	
				Bimbingan teknis CMS perdata dan tata usaha negara	566 orang	6.901.428.000,-	
				Pengadaan perangkat CMS perdata dan tata usaha negara	1 unit	20.549.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. • Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Layanan pemeliharaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satker Kejaksaan RI. • Jumlah layanan perkantoran.	Layanan umum.	1 layanan	1.400.000.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	13 unit	1.012.466.663.000,-	Jaksa Agung Muda Pembinaan
				Layanan sarana intelijen	9 paket	1.133667.880.000,-	
				Integrated intelligence system of attorney general Indonesia.	1 unit	2.125.000.000.000.-	
				Layanan sarana internal	86 unit	1.714.710.652.000.-	
				Layanan prasarana internal	1 unit	21.000.000,-	
				Pengembangan Implementasi Adhyaksa *Mediation Center.*	1 unit	700.000.000,-	
				Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data SOC.	1 unit	66.000.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan POS Pemilu	1 unit	119.200.000,-	
5276	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.		Penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan.	Layanan sekretariat Pusat Pemulihan Aset	1 laporan	789.020.000,-	Kepala Pusat Pemulihan Aset
				Penanganan dan penyelesaian pemulih-an aset yang terkait perkara.	38 laporan	8.800.000.000,-	
6773	Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		Jumlah rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum	Rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum	1 rekomendasi kebijakan	2.262.150.000,-	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis.	-	-	21.506.691.000,-	Jaksa Agung Muda Intelijen

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum.	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.				
1101	Operasi Inteliijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Intelijen.		Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang teknologi informasi dan produksi intelijen.	Kegiatan/operasi intelijen bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.	49 laporan	1.774.200.000,-	Direktur A
				Kegiatan Cegah dan Tangkat (CEKAL), Pengawasan Orang Asing (PORA), Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) dan penanganan perkara.	35 laporan	1.032.500.000,-	
1087	Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Intelijen.		Jumlah laporan.	Kegiatan/operasi intelijen di bidang sosial budaya dan kemasyarakatan.	101 laporan	1.502.000.000,-	Direktur B
				Kegiatan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan serta pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.	10 laporan	411.300.000,-	
1099	Operasi Inteliijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen.		Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan dan penanggulangan tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen di bidang ekonomi dan keuangan negara.	112 laporan	2.528.200.000,-	Direktur C
				Kegiatan penelusuran aset bidang intelijen.	20 laporan	580.000.000,-	
1112	Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Intelijen.		Jumlah laporan.	Pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis.	98 laporan	1.905.930.000,-	Direktur D

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1100	Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Intelijen.		Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang teknologi informasi dan produksi intelijen.	Kegiatan produksi intelijen.	18 laporan	189.600.000,-	Direktur E
				Kegiatan pemantauan.	141 laporan	1.903.260.000,-	
				Kegiatan sumber daya teknologi informasi.	7 laporan	597.400.000,-	
				Kegiatan pengamanan informasi.	23 laporan	592.400.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum. • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum. • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum. • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum. • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.	17 orang	2.051.169.000,-	Kepala Pusat Penerangan Hukum
				Pelayanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.	37 orang	1.763.688.000,-	
				Pelayanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.	51 orang	157.129.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi. • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.	2 lembaga	3.226.589.000,-	
1104	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen.		• Jumlah layanan *Cross Platform* Kejaksaan Agung. • Jumlah laporan pencegahan dan penangkalan. • Jumlah layanan *Tactical Intelijen Solution.* • Jumlah layanan pengembangan sistem pencarian orang. • Layanan pemeliharaan peralatan intelijen. • Persentase serangan siber yang ditangani melalui SOC	Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.	50 laporan	1.290.926.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	10.111.899.000,-	Jaksa Agung Muda Intelijen
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	1 layanan	10.111.899.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian pena-	• Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi.	-	-	38.276.097.000,-	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6579	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.	nganan perkara tindak pidana umum.	• Persentase penyelesaian perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pra penuntutan. • Persentase penyelesaian perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda. • Persentase perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda yang diselesaikan dalam tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif.	• Prapenuntutan tindak pidana terhadap orang dan harta benda. • Prapenuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya. • Prapenuntutan tindak pidana terorisme dan lintas negara. • Prapenuntutan tindak pidana narkotika. • Dukungan kegiatan teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. • *Restorative Justive* pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Penanganan perkara siber.	125 perkara 315 perkara 275 perkara 250 perkara 730 perkara 1100 perkara 225 perkara	256.250.000,- 645.750.000,- 563.750.000,- 512.500.000,- 66.079.000 4.547.238.000	Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
1109	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan perkantoran.	Pelaksanaan FGD, bimbingan teknis, dan sosialisasi.	220 orang	4.981.204.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
				Bimbingan teknis penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.	300 orang	2.000.000.000,-	
				Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.	33 laporan	4.542.389.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-		2.951.923.000,-	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		Jumlah layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	1 layanan	2.951.923.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan R.I melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	-	39.189.933.000,-	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi.	diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.				
1115	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.		Jumlah pelayanan kesekretariatan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.	Pelaksanaan FGD, Bimtek, Sosialisasi.	270 orang	1.090.578.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
			Jumlah pelayanan kesekretariatan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.	Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	12 laporan	5.607.780.000,-	
				Sosialisasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkepastian hukum	1700 orang	1.670.000.000,-	
6580	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.		• Layanan laporan dan pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang. • Persentase penyelesaian pra peradilan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. • Persentase penyelesaian pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tahap penyelidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	40 perkara	1.729.200.000,-	Direktur Penyidikan
				Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam tahap penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	40 perkara	5.800.000.000,-	
				Penanganan perkara pra peradilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	5 perkara	116.600.000,-	
				Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	35 perkara	1.808.875.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. • Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai. • Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana kepabeanan dan cukai.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	40 perkara	5.000.150.000	Direktur Penuntutan
				Perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.	35 perkara	1.318.275.000,-	
				Perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.	2 perkara	195.395.000,-	
			• Persentase penyelesaian eksaminasi umum perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian laporan eksaminasi khusus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai.	Pelaksanaan eksaminasi umum perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepa-beanan dan cukai.	100 laporan	304.000.000,-	Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi
				Pelaksanaan eksaminasi khusus perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepa-beanan dan cukai.	35 laporan	6.185.459.000,-	
			• Persentase penyelesaian pra penyidikan perkara tindak pidana HAM berat.	Perkara tindak pidana HAM berat dalam tahap prapenyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	5 perkara	380.400.000,-	Direktur Pelanggaran HAM Berat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana HAM berat. • Persentase penyelesaian pra peradilan perkara tindak pidana HAM berat. • Persentase penyelesaian pra penuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana HAM berat. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana HAM berat.	Perkara tindak pidana HAM berat dalam tahap penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	1 perkara	100.000.000,-	
				Perkara tindak pidana HAM berat dalam tahap pra peradilan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	1 perkara	5.948.000,-	
				Perkara tindak pidana HAM berat dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	1 perkara	23.786.000,-	
				Eksekusi perkara pelanggaran HAM berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	1 perkara	90.375.000,-	
			Persentase penanganan perkara tindak pidana korupsi tindak pidana khusus lainnya untuk satker daerah.	Dukungan kegiatan teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.	1 perkara	8.000.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	3.676.341.000,-	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		Jumlah layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	1 layanan	3.676.341.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana khusus

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL. PROFESIONAL. INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT. MANDIRI. DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia). nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi. Bermartabat dan Terpercaya). nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih. Efektif dan Terpercaya). dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum. pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.	• Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.	-	-	8.900.120.000,-	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan pertimbangan hukum. pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.				
6581	Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.		• Persentase pelaksanaan pemberian pendapat hukum. • Persentase pendampingan dan audit hukum. • Persentase tindakan hukum lain dan pelayanan hukum.	Pertimbangan hukum yang dilakukan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.	100 perkara	734.750.000,-	Direktur Pertimbangan Hukum
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.		• Persentase bantuan hukum penyelamatan. • Persentase bantuan hukum pemulihan. • Persentase bantuan hukum di forum arbitrase. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata.	Perkara perdata yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.	80 perkara	1.224.750.000,-	Direktur Perdata
	Penanganan Perkara Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.		• Persentase bantuan hukum tata usaha negara. • Persentase pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. • Persentase bantuan hukum uji materiel. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tata usaha negara.	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.	80 perkara	1.112.250.000,-	Direktur Tata Usaha Negara
1120	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.		Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I.	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	5.828.370.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	2.045.820.000,-	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		Jumlah layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	12 layanan	2.045.820.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.	-	-	14.548.546.000,-	Jaksa Agung Muda Pengawasan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	1 layanan	1.166.702.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
				Layanan pendidikan dan pelatihan.	50 orang	228.975.000,-	
				Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Satuan Tugas 53 (Satgas 53).	1 dokumen	23.450.000,-	
				Layanan pemantauan dan evaluasi.	1 dokumen	9.751.934.000,-	
6578	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan		• Persentase kegiatan pengawasan di bidang keuangan dan sistem pemantauan seluruh Kejaksaan RI. • Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Wilayah I. • Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Wilayah II. • Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Wilayah III. • Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Wilayah IV. • Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap	Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan.	1 dokumen	191.630.000,-	Inspektur Keuangan
				Reviu keuangan.	1 dokumen	21.880..000,-	
				Inspeksi khusus.	1 dokumen	2.455.975.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi Wilayah I.	36 dokumen	74.400.000,-	Inspektur I
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus Wilayah I.	12 dokumen	67.200.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi Wilayah II.	36 dokumen	74.400.000,-	Inspektur II
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan	12 dokumen	67.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penyalahgunaan wewenang pada Wilayah V.	diselesaikan melalui inspeksi kasus Wilayah II.			
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi Wilayah III.	36 dokumen	74.400.000,-	Inspektur III
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus Wilayah III.	12 dokumen	67.200.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi Wilayah IV.	36 dokumen	74.400.000,-	Inspektur IV
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus Wilayah IV.	12 dokumen	67.200.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi Wilayah V.	36 dokumen	74.400.000,-	Inspektur V
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus Wilayah V.	12 dokumen	67.200.000,-	

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur Kejaksaan RI.	Persentase sumber daya manusia Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.	-	-	603.693.387.000,-	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat	1 unit	1.806.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Kejaksaan RI.	Persentase penyelesaian perangkat pengolah data dan komunikasi.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.	2 unit	456.173.870.000,-	
			Terlaksananya layanan sarana internal.	Layanan sarana internal.	11 unit	377.250.000,-	
5008	Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan.		Persentase terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi.	Layanan perkantoran.	1 layanan	88.290.051.000,-	
				Layanan perencanaan dan penganggaran.	12 dokumen	2.645.892.000,-	
6577	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.		• Persentase aparatur Kejaksaan RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. • Persentase aparatur Kejaksaan RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan. • Persentase aparatur Kejaksaan RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan administrator. • Persentase aparatur Kejaksaan RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas. • Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Latihan Dasar Golongan II.	Layanan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa	400 orang	141.729.038.000,-	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
				Layanan pendidikan dan pelatihan	604 orang	16.800.678.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak	120 orang	1.847.416.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan teknis *Restorative Justice*	120 orang	1.678.560.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang	120 orang	1.678.560.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase aparatur Kejaksaan RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan lainnya yaitu TOC dan MOT 057.	Pendidikan dan pelatihan mafia tanah	120 orang	1.678.560.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan terpadu tindak pidana pemilu	120 orang	1.678.560.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan terpadu sensibilitas gender	120 orang	1.678.560.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan terpadu penanganan tindak pidana cipta kerja	120 orang	1.678.560.000,-	
				Pendidikan dan pelatihan terpadu pemulihan aset	120 orang	1.678.560.000,-	

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER
TAHUN 2023

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)

Visi : KEJAKSAAN RI YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Misi : Kejaksaan RI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	-	-	6.443.848.000,-	Jaksa Agung Muda Pidana Militer

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6583	Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer.		Persentase penyelesaian penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer.	• Koordinasi penindakan • Koordinasi penuntutan perkara koneksitas • Koordinasi eksekusi, upaya hukum dan eksaminasi • Penyelidikan perkara koneksitas • Penyidikan perkara koneksitas • Penyelesaian praperadilan perkara koneksitas • Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara koneksitas • Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas • Upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi perkara koneksitas	10 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 8 perkara 8 perkara 5 perkara 8 perkara 8 perkara 8 perkara	442.500.000,- 420.800.000,- 417.752.000,- 376.680.000,- 620.000.000,- 90.275.000,- 301.440.000,- 746.824.000,- 439.160.000,-	Direktur Penindakan Direktur Penuntutan Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi
6584	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer.		Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I.	Pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.	1 laporan	2.778.417.000,-	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
006.WA	Program Dukungan Manajemen.		Jumlah layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	1 layanan	1.100.000.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	13.133.940.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		secara transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	217.992.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	271.366.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	68.000.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	74.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	79.500.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	75.680.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	222.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	872.250.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.347.320.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	451.892.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	22.750.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	447.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.500.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	67.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	265.140.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	397.710.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	60.000.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	91.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	31.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	51.000.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	250.730.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	17.850.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	30.060.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	95.260.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	5.900.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	2.144.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	52.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat	-	4.978.858.957.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	650.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	620.993.000,-	
				Layanan perkantoran.	161.196.885.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	715.200.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	90.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	58.320.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	22.680.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	163.354.078.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	650.000.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	620.993.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	26.368.875.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus, dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO.	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	394.016.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	260.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi. • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Negeri	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	264.880.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	858.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dan dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dan melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang,	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	812.380.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6.710.375.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	427.900.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.649.004.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.416.020.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/	4.408.030.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1.908.065.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	285.800.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.518.440.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	49.540.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	88.040.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.331.775.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	351.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	127.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	182.400.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	30.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	2.563.370.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	111.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.*	-	386.296.193.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat	1.110.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	2.996.457.000,-	
				Layanan perkantoran.	378.679.536.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	3.099.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	340.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	34.762.013.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	557.696.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	362.960.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	378.400.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	1.219.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	961.440.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9.927.357.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	741.670.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.324.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	7.800.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	455.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	814.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.281.380.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	228.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	85.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	485.200.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	180.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	264.400.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	30.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	2.805.380.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	117.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja kejaksaan berbasis teknologi informasi.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	436.481.771.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	1.278.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	3.157.517.000,-	
				Layanan perkantoran.	427.045.654.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	4.529.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	400.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	7.082.084.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO.	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	121.216.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	75.680.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	222.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	359.400.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.095.778.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	131.200.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	54.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	447.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.500.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	641.970.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	39.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	60.000.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	91.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	31.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	51.000.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	30.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	365.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	21.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	163.207.438.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan *IT Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	310.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	867.610.000,-	
				Layanan perkantoran.	161.023.628.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	80.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	715.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	140.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	48.179.734.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	571.336.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	381.560.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	387.860.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	1.303.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.926.640.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18.938.783.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	899.900.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.413.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8.100.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	465.210.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	1.320.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.632.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	56.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	231.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.142.450.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	520.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	189.600.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	268.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	3.521.615.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	165.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan RI berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan RI dengan IT *master plan.* • Persentase. penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.	-	463.991.043.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	1.381.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	3.930.479.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan perkantoran.	453.199.764.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	360.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	4.648.800.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	400.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI ACEH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas serta kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	27.065.677.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		(HAM) berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalang-an di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri.	394.016.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	242.060.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	264.880.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	818.400.000,-	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	668.280.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	7.699.977.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	433.140.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan	74.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum.	Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.579.400.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.300.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	288.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	420.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.017.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	153.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	325.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	117.600.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	169.800.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	30.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	3.234.694.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja kejaksaan berbasis teknologi informasi . • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.		214.964.062.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	930.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.753.655.000,-	
				Layanan perkantoran.	195.185.173.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	13.305.034.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	240.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	3.099.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	380.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	39.205.535.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO.	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	557.696.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	288.560.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	378.400.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	1.061.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.928.184.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12.702.608.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.106.741.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	2.076.520.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas.	Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6.955.730.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	423.580.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	414.380.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	5.487.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	211.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	390.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	141.600.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	202.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	3.898.356.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	103.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	378.317.651.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	1.252.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	3.630.676.000,-	
				Layanan perkantoran.	341.253.775.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan	Layanan sarana internal.	187.500.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala
				Layanan prasarana internal	26.673.100.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan ruang *restorative justice*	240.000.000,-	Cabang Kejaksaan Negeri
				Pembuatan pos pemilu	4.529.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	470.225.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.375.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	19.488.960.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO.	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	353.096.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	176.960.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan penyuluhan hukum di pusat dan daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	236.500.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	643.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	783.990.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	5.747.244.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	331.440.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	1.281.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	4.300.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I.	288.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II.	588.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III.	2.124.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	53.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	138.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp.82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	234.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	84.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	123.600.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	30.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.131.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	63.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja kejaksaan berbasis berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara.		173.453.124.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	760.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.757.726.000,-	
				Layanan perkantoran.	193.452.481.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	40.200.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	2.741.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	330.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	30.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI RIAU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	17.530.422.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri.	216.696.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	139.760.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	141.900.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	444.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	753.020.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6.381.836.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	530.960.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	78.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	863.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.900.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	752.210.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	120.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	750.760.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	96.500.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	182.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	62.400.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	97.200.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	149.700.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	15.000.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	97.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	80.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	2.181.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	54.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM.		144.711.999.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	696.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.503.221.000,-	
				Layanan perkantoran.	140.612.178.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.549.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	237.640.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	41.160.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	32.200.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAMBI FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	12.014.162.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	218.376.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	120.560.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum. • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum. • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum. • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum. • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	141.900.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi. • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	405.000.000,-	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	428.580.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.682.108.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	218.180.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	832.440.000,-	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	2.683.760.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	67.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase pemberian pertimbangan hukum. Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.551.254.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan	77.992.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	156.380.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	58.752.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	84.300.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	529.300.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	771.900.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	37.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI). • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara.	-	119.317.420.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan BPK RI • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian PAN dan RB. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	563.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.150.048.000	
				Layanan perkantoran.	115.753.772.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	1.549.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	230.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *PUTPUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program penegakan dan pelayanan hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	20.071.599.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayaanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan penyelidikan/ pengamanan /penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	257.616.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	167.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan penyuluhan hukum di pusat dan daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	170.280.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	540.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6582	Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi,	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	787.960.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	7.673.873.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	397.880.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.043.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.500.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persenntase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	67.500.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	2.276.950.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan	99.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	221.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	79.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	117.000.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi	40.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.		
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	1.730.700.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	64.500.000.-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian PAN dan RB.		214.268.406.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	868.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	870.000.000,-	
				Layanan perkantoran.	210.211.506.000,-	
1091	Pembangunan /pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	80.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.907.200.000,-	
1097	Pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	260.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	15.501.072.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayaanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/ operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	284.896.000,-	
				Kegiatan/ operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksan Negeri	158.360.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	189.200.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	544.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang,	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	635.220.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4.461.026.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	318.960.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.072.800.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/	3.600.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	768.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	568.380.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.025.750.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	102.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	208.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	74.400.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	110.400.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	853.350.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	48.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi.. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *master plan.*	-	244.847.170.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	640.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.234.556.000,-	
				Layanan perkantoran.	188.566.754.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	51.939.260.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	2.145.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	250.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut Laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	16.305.649.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelang-garan HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	230.336.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	130.460.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	151.360.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	436.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	738.770.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.002.823.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	326.920.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	864.200.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	2.900.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	2.467.950.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	149.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	168.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	60.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	90.600.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	30.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	1.737.450.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	43.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan asset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *master plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara.	-	123.170.875.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	530.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum	1.083.714.000,-	
				Layanan perkantoran.	119.647.361.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	1.668.800.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	270.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTOUT*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	15.218.748.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	257.616.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	167.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	170.280.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	520.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melal.ui pendekatan keadilan restoratif • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	712.092.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.730.273.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	691.177.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.013.200.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	3.397.720.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas.	pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	313.250.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	884.312.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	940.368.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	388.620.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	208.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	74.400.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	110.400.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	1.165.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	46.500.00,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi.. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *master plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara.	-	129.693.762.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	600.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.480.440.000,-	
				Layanan perkantoran.	125.225.122.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	120.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.907.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	290.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	17.681.983.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	230.336.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	149.060.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	151.360.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	476.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	855.590.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.980.188.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	608.780.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	923.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.100.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	992.210.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	407.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	501.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	87.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.	195.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	69.600.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	103.800.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.919.379.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	54.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *master plan.*	-	142.223.339.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	571.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum	1.497.720.000,-	
				Layanan perkantoran	138.074.8019.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	80.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.668.800.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	260.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	19.926.561.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	230.336.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	149.060.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	151.360.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	476.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	554.963.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6.290.325.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	491.047.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	23.600.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	923.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.020.000,000-,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	712.830.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.440.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan	Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	317.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	187.650.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	85.950.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	94.800.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	60.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.955.460.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	58.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM.	-	123.580.210.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *master plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat	550.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum	1.458.443.000,-	
				Layanan perkantoran	119.531.967.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	1.668.800.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	300.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	15.079.616.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	230.336.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Tinggi/Kejaksaan Negeri.		
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	130.460.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	151.360.000,-	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	436.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	529.260.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4.160.470.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	214.680.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang	864.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase praenuntutan dan Penuntutan perkara koneksitas.	pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.900.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	288.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/	2.204.820.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	144.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000 ,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	169.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	60.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	90.600.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.584.200.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	43.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.	-	115.049.003.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat	530.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.589.788.000,-	
				Layanan perkantoran.	104.137.415.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	6.662.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	120.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.668.800.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	270.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	16.644.134.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Tindak Pidana Khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ pengalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO.	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an, dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	380.376.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	121.160.000	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	255.420.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	549.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	443.520.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4.019.624.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	240.350.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	1.162.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.900.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	96.500.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.279.950.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana	50.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	111.000.000	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	156.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	55.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	84.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.253.654.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	58.500.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	126.680.411.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat	748.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum	1.285.290.000,-	
				Layanan perkantoran	111.464.315.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	9.781.806.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	2.980.000.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	350.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	28.549.450.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an, dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	489.316.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	242.060.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	331.100.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	902.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	886.750.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8.687.554.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	527.300.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	1.788.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	6.000.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	553.590.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	506.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.120.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	192.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	316.600.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	124.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di	171.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.		
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000	
				Pemeliharaan, pemusnah-an, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.724.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	109.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.	-	263.888.222.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat.	1.259.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	3.220.875.000,-	
				Layanan perkantoran.	254.773.747.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala
				Layanan prasarana internal	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan ruang *restorative justice*	240.000.000,-	Cabang Kejaksaan Negeri
				Pembuatan pos pemilu	3.933.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	390.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	13.364.266.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	189.416.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	121.160.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	122.980.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	381.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	480.710.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.954.290.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	170.080.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	745.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.500.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	220.950.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	1.030.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.411.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	141.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	156.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	55.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	84.000.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnah-an, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	1.091.800.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.	-	100.957.743.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			Cabang Kejaksaan Negeri
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan dan langganan Vsat	460.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum	1.430.042.000,-	
				Layanan perkantoran	97.402.841.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala
				Layanan prasarana internal	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	Cabang Kejaksaan Negeri
				Pembuatan pos pemilu	1.311.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	282.660.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI MALUKU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	15.692.002.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan / pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	243.976.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	111.860.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	160.820.000,-	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	409.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	479.080.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.702.119.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	187.977.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	834.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.800.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	441.020.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.769.190.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	267.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	143.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	50.400.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	50.400.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	60.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.089.580.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	37.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM.	-	101.324.703.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *master plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat	530.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.041.828.000,-	
				Layanan perkantoran.	97.512.395.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.788.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	341.480.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BALI FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	10.646.750.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	189.416.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	45.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	111.860.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	122.980.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	361.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	498.300.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.998.549.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	187.500.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	130.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	715.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.400.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	818.730.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	240.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	96.500.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	64.500.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	143.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	50.400.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	77.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	50.00.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	100.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	180.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	40.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	602.235.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	25.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	154.123.615.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset Negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat	467.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum	1.068.951.000,-	
				Layanan perkantoran	151.025.179.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	1.311.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	180.285.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	8.561.541.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Tindak Pidana Khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	148.496.000	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	93.260.000	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	94.600.000	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	285.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	428.144.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.079.511.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	141.600.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	566.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.900.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	67.500.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.284.950.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.800.000	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	117.000.000	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	40.800.000	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	64.200.000	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	700.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	21.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM.		99.061.200.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	401.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.261.758.000,-	
				Layanan perkantoran.	96.133.842.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	953.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	200.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	22.262.522.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	160.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an, dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	312.176.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	186.260.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	208.120.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	627.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	771.485.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4.702.998.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	402.643.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	1.221.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan lengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.100.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	67.500.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	6.445.650.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	405.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	247.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	88.800.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	130.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	120.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	29.800.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	50.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	80.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	20.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.453.310.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	34.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	146.043.615.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	710.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	985.985.000,-	
				Layanan perkantoran.	121.555.630.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	20.000.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	2.384.000.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	337.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI PAPUA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	12.345.214.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	141.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	32.496.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	93.260.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	94.600.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	285.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	474.400.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.614.258.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	178.100.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	950.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.090.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	150.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.267.120.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	159.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	102.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	135.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	60.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	64.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	76.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	50.000.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	110.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	200.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	60.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	565.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	22.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	76.652.889.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	444.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	969.341.000,-	
				Layanan perkantoran.	73.893.248.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	953.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	270.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	61.920.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	60.780.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak), dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	10.533.375.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	189.416.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	121.160.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	122.980.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	381.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	576.480.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.590.959.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	177.180.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	745.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.500.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	288.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	720.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	501.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	60.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	156.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	55.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	84.000.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	767.370.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	19.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM.	-	109.228.282.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	460.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	568.962.000,-	
				Layanan perkantoran.	61.302.185.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	12.800.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.311.200,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	200.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.300.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase Perkara Tindak Pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	12.688.876.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	189.416.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	121.160.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	122.980.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	381.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	347.900.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2.258.710.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	139.200.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	745.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.500.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	288.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.451.680.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	231.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	156.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	55.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	84.000.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.120.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	19.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM.	-	93.615.184.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	495.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	568.962.000,-	
				Layanan perkantoran.	61.302.185.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	19.764.308.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	80.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.311.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	250.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.300.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BANTEN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak), dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	12.749.893.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan, • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi, • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat, • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	148.496.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	93.260.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	94.600.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	285.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	649.215.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.794.962.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	292.720.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	566.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di kejaksaan tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.900.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	176.760.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	641.970.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	50.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	117.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	40.800.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di	64.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.		
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnah-an, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.308.930.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	46.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.	-	121.392.298.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	532.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	925.810.000,-	
				Layanan perkantoran.	118.729.888.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan ruang *restorative justice*.	-	
				Pembuatan pos pemilu.	953.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, audit reviu.	180.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	12.749.893.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	148.496.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	93.260.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	94.600.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	285.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	649.215.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.794.962.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	292.720.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	566.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.900.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	176.760.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	641.970.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	117.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	40.800.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	64.200.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnah-an, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.308.930.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	46.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	121.392.298.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan *IT Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah Layanan Perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	532.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	925.810.000,-	
				Layanan perkantoran.	118.729.888.000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	953.600.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	180.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	40.400.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum, • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang	-	6.879.454.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	134.856.000,-	
				Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	83.960.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	85.140.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	253.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	421.250.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.534.688.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	108.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	506.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.700.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	155.880.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	208.380.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	554.950.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	45.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	104.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	36.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	57.600.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	399.670.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan ase	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM.	-	81.830.715.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Master Plan*. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	340.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	560.295.000,-	
				Layanan perkantoran.	59.837.157.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	20.000.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	
				Pembuatan pos pemilu	834.400.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	197.963.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.300.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	-	12.156.002.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh kejaksaan tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/peng galangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	175.776.000,-	
				Kegiatan/ operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	83.960.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	113.520.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	289.800.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap Eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	564.500.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.507.768.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	318.308.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	596.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakanan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.000.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	408.450.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	336.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	2.074.480.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	179.660.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	104.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	36.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	57.600.000,-	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	1.807.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	25.500.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/ WBBM.	-	74.207.049.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT *master plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	400.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	1.601.550.000,-	
				Layanan perkantoran.	70.652.599.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	1.192.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	260.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	8.523.644.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan Instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana.	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	121.216.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO).	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	74.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	75.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	75.680.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	222.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	340.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.954.228.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	95.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	750.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang , perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.650.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	525.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.930.080.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana	100.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	111.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	102.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	105.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	45.600.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	51.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	76.000.000,-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	50.000.000,-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	110.000.000,-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	200.000.000,-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	60.000.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	444.000.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	172.285.882.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	388.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	515.859.000,-	
				Layanan perkantoran.	45.405.403.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	125.000.000.000,-	
				Pembuatan ruang *restorative justice*	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan pos pemilu	715.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	20.640.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	60.780.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak	• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatpresan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. • Persentase perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	-	6.047.640.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur tindak pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *online* di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana.	Pencarian buron tindak pidana/DPO	80.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	196.216.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Pencarian/penangkapan buron tindak pidana.	Kegiatan/operasi intelijen pada posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	25.680.000,-	
				Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	72.500.000,-	
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	74.660.000,-	
				Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	75.680.000,-	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	222.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	307.350.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.243.429.000,-	
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	91.925.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/	447.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.500.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	67.500.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	937.000.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	91.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	31.200.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	51.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	212.114.000,-	
				Restorative Justice perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.	• Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	-	46.290.576.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran.	Penambahan layanan internet, instalaasi, jaringan dan langganan Vsat.	395.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan umum.	572.870.000,-	
				Layanan perkantoran.	44.347.046.000,-	
1091	Pembangunan /Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal	-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan prasarana internal	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pembuatan ruang *restorative justice*	40.000.000,-	
				Pembuatan pos pemilu	715.200.000,-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	179.960.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	10.200.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI BANGKOK FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01. WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	2.097.308.000,-	Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama Hukum.		• Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri. • Jumlah layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri.	Layanan perkantoran	1 layanan	893.950.000,-	
				Layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri	1 layanan	1.203.358.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01. WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	2.093.124.000,-	Kepala Bidang Kejaksaan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama Hukum.		• Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri. • Jumlah layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri.	Layanan perkantoran	1 layanan	744.200.000,-	
				Layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri	1 layanan	1.318.924.000,-	
1091	Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan	Layanan sarana internal	1 unit	30.000.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI RIYADH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01. WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	2.093.124.000,-	Atase Hukum pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama Hukum.		• Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri. • Jumlah layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri.	Layanan perkantoran	1 layanan	653.769.000,-	
				Layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri	1 layanan	1.405.355.000,-	
1091	Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan	Layanan sarana internal	1 unit	34.000.000,-	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01. WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	-	-	2.092.058.000,-	Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama Hukum.		• Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri. • Jumlah layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri.	Layanan perkantoran	1 layanan	752.500.000,-	
				Layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri	1 layanan	1.339.558.000,-	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN